

BAB III

SIKAP TURKI DALAM OPERASI PEMBEBASAN MOSUL

Sebelum menjelaskan sikap pemerintah Turki terkait Operasi Pembebasan Mosul, pada bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat profil Negara Iraq dan konflik vertikal antara pemerintah Iraq dengan kelompok ISIS, termasuk mengenai upaya ISIS dalam merebut berbagai wilayah dan menyebabkan kekacauan di Iraq. Kemudian akan dijelaskan mengenai Operasi Pembebasan Mosul di Iraq dan bagaimana pemerintah Turki mensikapi operasi tersebut.

A. Konflik Pemerintah Iraq dengan Kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)

Republik Iraq merupakan negara yang terletak di wilayah Timur Tengah dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, selama Perang Dunia II tahun 1920 Iraq berada di bawah administrasi Inggris. Iraq mendapatkan kemerdekaannya dan berdiri sebagai sebuah kerajaan pada tahun 1932, kemudian pada tahun 1958 Iraq diproklamirkan sebagai negara republik. Setelah menjadi negara republik, Iraq selalu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang otoriter hingga berakhirnya rezim Saddam Hussain yang menjabat sebagai Presiden Iraq sejak 1979 hingga 2003. (Central Intelligence Agency, 2018)

Negara Iraq berbatasan dengan Turki di sebelah utara; Iran di sebelah timur; Arab Saudi, Kuwait dan Teluk Persia di sebelah selatan; serta Jordan dan Syria di sebelah barat. Jumlah penduduk Iraq per 2017 adalah sebanyak 39.192.111 jiwa. Etnis mayoritas di Iraq adalah Arab yaitu sebanyak 75-80%, kemudian etnis Kurdi sebanyak 15-20%, dan sisanya seperti Turkmen, Yezidi, Shabak, Kaka'i, maupun Asiria merupakan etnis minoritas yang jumlahnya hanya sekitar 5%. Mayoritas penduduk Iraq adalah beragama Islam yang menganut paham Syiah. (Central Intelligence Agency, 2018)

Iraq adalah negara republik federal yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Ibukota Iraq terletak di Baghdad. Negara ini memiliki 18 provinsi dan satu wilayah bagian yaitu *Kurdistan Regional Government*. Saat ini Iraq dipimpin oleh Presiden Fuad Masum dan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri Haidar al-Abadi. Lembaga legislatif Iraq menganut sistem unikameral dan dikenal dengan nama *Majlis an-Nuwwab al-Iraqiyy*. Lembaga ini terdiri dari 328 kursi, sebanyak 8 kursi disediakan untuk perwakilan dari kelompok minoritas yang ada di Iraq. Lebih lanjut, sistem hukum di Iraq merupakan sistem campuran yang mengadopsi hukum sipil dan hukum Islam. (Central Intelligence Agency, 2018)

Selama beberapa dekade, kondisi domestik Iraq dapat dikatakan tidak stabil. Pada era sebelum Saddam Hussain, Iraq telah mengalami setidaknya dua kali kudeta. Pada era kepemimpinan Saddam Hussain, pemerintah Iraq melakukan diskriminasi kepada masyarakat Syiah dan Suku Kurdi yang menimbulkan gerakan perlawanan terhadap pemerintah. Sikap keras dan diskriminatif pemerintahan Saddam Hussain terhadap Kurdi Iraq dan kelompok Syiah bahkan menimbulkan respon dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang kemudian menetapkan zona larangan terbang pada tahun 1991 untuk melindungi suku Kurdi di Iraq utara dan kelompok Syiah di Iraq selatan. Iraq juga pernah mengalami embargo ekonomi dari PBB sejak 1991 hingga 2003 sebagai sanksi atas invasi Saddam Hussain ke Kuwait.

Instabilitas Iraq tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi ke Iraq dengan tujuan menghentikan pemerintahan Saddam Hussain dan program proliferasi senjata pemusnah massal yang selama itu diduga barat telah berlangsung di Iraq. Saddam Hussain akhirnya berhasil diturunkan dari jabatannya pada 9 April 2003. Pasca turunnya Saddam Hussain, keberadaan militer Amerika Serikat di Iraq berupaya melakukan transisi sistem pemerintahan dari sistem diktator menjadi sistem politik yang mengakomodasi

pluralisme sehingga berbagai sekte, kelompok dan partai politik di Iraq dapat berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu kemudian dilaksanakan di Iraq pada tahun 2005 dan membentuk pemerintahan baru yang berupaya meningkatkan persatuan Iraq. Meskipun demikian, konflik antar kelompok di Iraq tetap menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan. (Katzman, 2015)

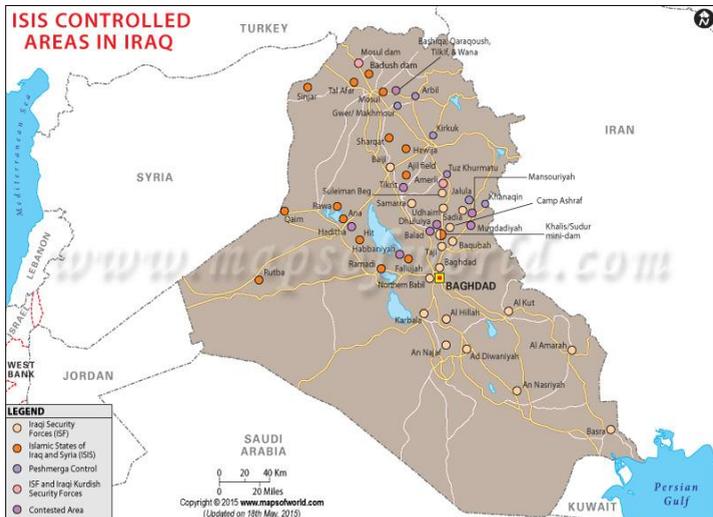
Pada tahun 2014 kondisi domestik Iraq kembali mengalami kekacauan pasca munculnya kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) atau yang sering disebut dengan nama *Daesh*. Kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi tersebut mendeklarasikan berdirinya Khilafah Islam pada 29 Juni 2014 di Mosul, Iraq. Sebelum terbentuk menjadi ISIS, kelompok ini merupakan bagian dari Al-Qaeda Iraq (AQI). Pada Juni 2006, pemimpin AQI yaitu Abu Mus'ab al-Zarqawi tewas akibat serangan udara Amerika Serikat. Setelah kematian al-Zarqawi kelompok tersebut kemudian dipimpin oleh Abu Hamza al-Muhajir yang langsung mendeklarasikan berdirinya *Islamic State of Iraq* (ISI) yang masih tergabung dengan kelompok Al-Qaeda. Peristiwa Arab Spring dan pecahnya perang sipil di Syria pada tahun 2011 memberikan keuntungan bagi ISI untuk masuk ke Syria. Abu Bakr al-Baghdadi yang mulai memimpin ISI sejak April 2013 segera memanfaatkan situasi di Iraq dan Syria untuk mengkonsolidasikan kontrolnya di dua negara tersebut. Selain itu, mulai tahun 2013 muncul persoalan antara ISI dan Al-Qaeda pusat, salah satunya disebabkan ketidakpatuhan ISI terhadap perintah-perintah dari Al-Qaeda. Nama ISIS pun mulai digunakan sejak 2013 hingga pada tahun 2014 ISIS dideklarasikan menjadi sebuah Negara Islam yang terpisah dari kelompok Al-Qaeda. (Acun, 2014)

Berdasarkan propaganda yang selama ini dilakukan, tujuan ISIS adalah mendirikan kekhilafahan global. Kelompok ini telah seringkali menyebarkan visi globalnya, seperti yang tertulis dalam majalah *Dabaq*, sebuah media cetak milik ISIS : (Mcfate, 2015)

“The flag of Khalifah will rise over Makkah and al-Madinah, even if the apostates and hypocrites despise such. The flag of Khalifah will rise over Baytul-Maqdis [Jerusalem] and Rome, even if the Jews and Crusaders despise such. The shade of the blessed flag will expand until it covers all eastern and western extents of the Earth, filling the world with the truth and justice of Islam and putting an end to the falsehood and tyranny of jahiliyyah [ignorance], even if America and its coalition despise such.”

Kemunculan ISIS menimbulkan persoalan besar bagi Iraq. Kelompok ini juga mengancam keamanan regional dan global. Sejak kemunculannya, ISIS berupaya untuk mendapatkan persenjataan, sumber daya, dan merekrut banyak simpatisan. Selain itu ISIS juga menguasai banyak kota di Iraq, seperti Fallujah, Ramadi, Mosul, Tikrit, Sinjar, Tal Afar, Sharqat, Baiji, Hawija, al-Qaim, Ruthba, Habbaniyah, dan Rawa.

Gambar III.1. Peta Area di Iraq yang Dikuasai Oleh ISIS



Source : www.mapsoftheworld.com

Selama eksistensinya di Iraq, kelompok ISIS sering melakukan kekejaman dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang ada di wilayah taklukan seperti orang-orang Turkmen, Yazidi, Shabak, dan penganut agama lain. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh *United Nations Assistance Mission for Iraq* (UNAMI) sejak menduduki Mosul pada Juli 2014 ISIS telah melakukan pengusiran terhadap penduduk yang beragama Kristen dan menyita rumah serta benda-benda milik mereka. Tercatat per 20 Juli 2014 sebanyak ribuan penduduk yang beragama Kristen sudah meninggalkan Mosul. (United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), 2014)

ISIS juga banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Yazidi, bahkan karena jumlah korban yang begitu banyak aktivitas tersebut kemudian disebut sebagai sebuah genosida. Kota Sinjar merupakan tempat tinggal bagi 400.000 orang Yazidi sebelum ISIS berhasil menguasai kota tersebut. PBB memperkirakan sebanyak 3000 orang Yazidi dibunuh

dan 6000 lainnya ditawan. Para perempuan Yazidi yang menjadi tawanan juga seringkali mengalami pemerkosaan. (Shackle, 2017) Pembunuhan yang dilakukan ISIS terhadap orang-orang Yazidi biasanya dilakukan dengan cara menembak, pemenggalan atau dikubur hidup-hidup. Banyak pula mereka yang meninggal karena kelaparan, dehidrasi atau terluka selama pengepungan ISIS di Gunung Sinjar. Militer Kurdi berupaya menyelamatkan orang-orang Yazidi dengan menyediakan jalur aman bagi mereka untuk melarikan diri ke wilayah Kurdistan Region melalui Syria. (Dearden, 2017)

ISIS seringkali melakukan serangan yang menargetkan penduduk sipil dan infrastruktur publik di Iraq. Kelompok ini juga banyak melakukan penculikan terhadap anggota militer Iraq, pemerintah Iraq, tahanan yang berpaham Syiah, dan orang-orang yang berasal dari agama atau etnis minoritas. Tragedi yang cukup menyita perhatian adalah pada 12 Juni 2014, ISIS menangkap dan membunuh 1500 tentara Iraq yang bertugas di pangkalan militer Camp Speicher, Provinsi Salah al-Din, peristiwa ini kemudian dikenal sebagai *Camp Speicher Massacre*. Pada 16 Juli 2014 ISIS kembali membunuh 42 tentara Iraq di Tikrit selatan, dan masih banyak lagi pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS terhadap militer Iraq. (United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), 2014)

Selain melakukan pembunuhan, ISIS juga sering melakukan bom bunuh diri, baik di Iraq maupun di negar-negara lain. Pada 25 Agustus 2014, pelaku bom bunuh diri dari ISIS meledakkan dirinya sendiri di sebuah masjid Syiah di wilayah New Baghdad yang membunuh 10 orang. Serangan bom ISIS yang cukup besar terjadi di Baghdad pada Juli 2016 menewaskan setidaknya hampir 300 orang. Bom tersebut merupakan ledakan yang paling mematikan di Baghdad sejak tahun 2003. (Sims, 2016) Sejak kemunculannya hingga Februari 2018, ISIS telah melakukan sebanyak 140 serangan teroris di 29 negara selain Iraq dan Syria. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan setidaknya 2.043 orang. (Lister, 2018)

Pemerintah Iraq segera berupaya memerangi ISIS sejak kemunculannya di tahun 2014 terutama untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya yang dikuasai oleh kelompok ini. Berikut adalah daftar kota-kota yang telah berhasil direbut kembali oleh pemerintah Iraq : Tikrit (31 Maret 2015), Baiji (20 Oktober 2015), Sinjar (13 November 2015), Ramadi (28 Desember 2015), Ruthba (Mei 2016), Fallujah (26 Juni 2016), Sharqat (22 September 2016), Mosul (Juli 2017), Tal Afar (Agustus 2017), Hawija (Oktober 2017), Al-Qaim (3 November 2017), dan Rawa (17 November 2017). (United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), 2014). Penaklukan Rawa disebut sebagai kota terakhir yang berhasil direbut kembali oleh pemerintah Iraq dan pada Desember 2017 Iraq mengumumkan berakhirnya perang melawan ISIS. Komandan militer Iraq, Letnan Jenderal Abdul-Amir Rasheed Yar Allah menyatakan bahwa seluruh wilayah Iraq telah dibebaskan dari kelompok Daesh dan militer Iraq berhasil menguasai kembali batas negara Iraq-Syria. Lebih lanjut, Perdana Menteri Iraq, Haidar al-Abadi mengatakan bahwa perang melawan ISIS telah menghabiskan dana setidaknya 100 milyar dollar Amerika. (AlJazeera, 2017)

Selain pemerintah Iraq, negara-negara lain juga turut memerangi kelompok ISIS di Iraq dan Syria. Untuk itu, pada 17 Oktober 2014 di Kuwait, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk sebuah koalisi internasional yang dikenal sebagai CJTF-OIR (*Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve*). Sebelum CJTF-OIR, Amerika Serikat lebih dulu membentuk JFLCC (*the Joint Forces Land Component Command*) pada 24 Juni 2014 untuk mengorganisir operasi militer di Iraq. Mulai Agustus 2014, JFLCC menggempur ISIS melalui serangan-serangan udara. CJTF-OIR melakukan kerjasama dengan militer Iraq termasuk Lembaga Penanggulangan Terorisme Iraq, polisi federal serta Peshmerga. Motto dari koalisi ini adalah *One Mission, Many Nations*, dan sesuai dengan motto tersebut lebih dari 60 negara bergabung ke dalam koalisi global anti ISIS. (CJTF-OIR,

2014) Koalisi ini telah membantu baik pemerintah Iraq maupun Syria untuk memerangi ISIS.

Menghadapi serangan yang begitu masif baik dari pemerintah Iraq, kelompok-kelompok paramiliter di Iraq hingga koalisi internasional memaksa kelompok ISIS untuk memiliki strategi mempertahankan diri dan memperluas wilayahnya. Melakukan ekspansi ke wilayah lain merupakan salah satu strategi ISIS untuk menjaga eksistensinya di dunia sekaligus implementasi dari tujuannya menciptakan kekhalifahan global. ISIS membagi strateginya ekspansinya ke dalam tiga lingkaran regional : Lingkaran dalam mencakup Iraq dan Syria, lingkaran luar terdekat mencakup Timur Tengah dan Afrika Utara, serta lingkaran luar jauh mencakup Eropa, Asia dan Amerika Serikat. (Mcfate, 2015) Selain melakukan ekspansi global, ISIS juga menggunakan cara-cara lain seperti : menginterpretasikan Islam hanya berdasarkan pemahaman kelompok untuk menjustifikasi aktivitasnya; menciptakan konflik untuk melemahkan negara-negara; merekrut pengikut dari berbagai negara di dunia; berafiliasi dengan kelompok yang ada di negara lain seperti laporan dari PBB yang menyatakan bahwa ISIS berafiliasi dengan 34 kelompok yang tersebar di Libya, Afghanistan, Pakistan, Algeria dan Indonesia; serta melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana misalnya dengan merampok termasuk situs-situs arkeologi di Syria, menculik, menyelundupkan benda-benda antik, tebusan untuk korban sandera, penjualan minyak secara ilegal yang menghasilkan setidaknya 400 hingga 500 juta dollar pada tahun 2015, dan menarik pajak dari masyarakat yang berada di wilayah pendudukan. (Oosterveld, 2016)

Konflik internal antara pemerintah Iraq dengan ISIS ini sudah berdampak cukup buruk bagi masyarakat Iraq. Per 30 Agustus 2014, hampir 1,8 juta orang di seluruh Iraq harus menjadi pengungsi, sebanyak 50% (862,458) berada di wilayah KRG, 343.284 di Provinsi Anbar dan 503.436 di wilayah Iraq yang lain. Pemerintah KRG sudah mendirikan sejumlah kamp untuk menampung setidaknya 26.000 orang,

sementara sisanya tinggal di bangunan terlantar, sekolah, masjid dan gereja. Organisasi PBB telah bekerjasama dengan pemerintah Iraq untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Iraq yang menjadi korban konflik. Pada tahun 2014 sebanyak 47 pesawat kargo mendarat di Erbil membawa setidaknya 7000 ton bantuan kemanusiaan. (United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), 2014)

B. Operasi Pembebasan Mosul

Operasi Pembebasan Mosul merupakan sebuah operasi militer yang diadakan oleh pemerintah Iraq bersama aliansinya untuk merebut kembali Kota Mosul yang telah diduduki ISIS sejak Juni 2014. Pada Hari Senin, 17 Oktober 2016, Perdana Menteri Iraq Haidar al-Abadi, mengumumkan dimulainya upaya merebut kembali Kota Mosul di bawah sebuah operasi militer yang dinamakan *We are Coming Nineveh Operation*. Upaya merebut kembali Mosul sebenarnya sudah dilakukan sejak 2015 baik oleh pemerintah Iraq maupun oleh pemerintah KRG meskipun sampai 2017 Mosul tetap belum dapat dibebaskan dari ISIS. (Assi, 2016)

Mosul merupakan salah satu kota penting sekaligus kota tertua di Iraq. Berdiri sejak 1080 SM, kota ini terletak di pusat Provinsi Nineveh dan memiliki jumlah penduduk sebesar 1,5 juta jiwa. Mosul juga merupakan kota terbesar kedua di Iraq setelah Baghdad dan terbagi menjadi 8 wilayah administratif, yaitu Al-Hadbaa, Al-Zuhur, Al-Jazaer, Al-Rabee, Kota Tua Mosul, Al-Ghizlani, Mosul Al-Jadedda, dan Al-Salam. Kota ini terbelah oleh Sungai Tigris sehingga salah satu bagiannya terletak di sebelah kanan sungai dan bagian yang lain berada di kiri sungai. Mosul terkenal dengan beragam budaya, sosial, agama dan etnisnya. Berdasarkan sejarah, Mosul merupakan kota yang heterogen karena memiliki populasi yang beragam seperti etnis Arab (mayoritas Sunni); Kurdi (mayoritas Sunni); Turkmen (Sunni dan Syiah); Shabak (Syiah); Asiria, Arman, Chaldea (Kristen) dan Yazidi. Akan tetapi, sejak jatuh dalam kekuasaan ISIS, terjadi eksodus besar-besaran di Mosul karena ISIS melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap

kelompok serta agama minoritas. (United Nations Human Settlements Programme in Iraq, 2016)

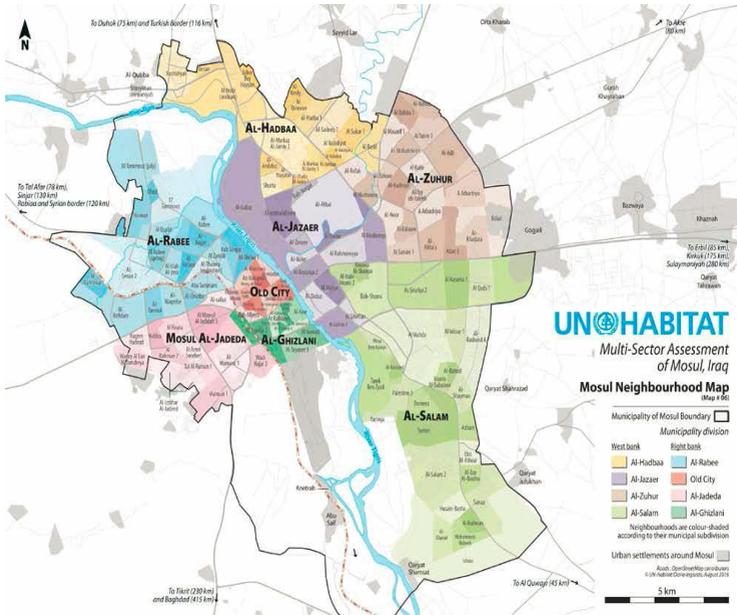
Gambar III.2. Letak Kota Mosul



Source : www.alaraby.co.uk

Berikut ini merupakan peta Mosul yang diambil dari laporan *United Nations Human Settlements Programme in Iraq* :

Gambar III.3. Peta Kota Mosul



Source : UN Human Settlements Programme in Iraq

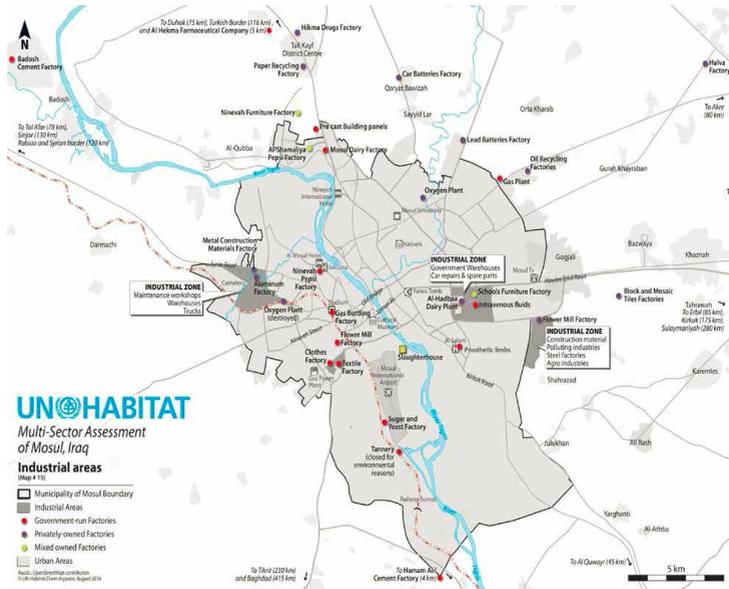
Pembebasan Kota Mosul dari ISIS merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Iraq. Mosul adalah sebuah kota kuno bagi orang-orang Asiria dan memiliki banyak peninggalan sejarah serta pusat dari identitas negara Iraq. Namun banyak peninggalan-peninggalan sejarah tersebut yang dihancurkan oleh ISIS. Seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwa setelah dikuasai oleh ISIS terjadi eksodus besar-besaran kelompok minoritas yang ada di Mosul, sehingga dengan membebaskan Mosul dari ISIS maka kelompok minoritas tersebut dapat kembali ke Mosul. Keberhasilan merebut Mosul dari ISIS merupakan pencapaian yang besar untuk dapat mengalahkan ISIS di seluruh Iraq. Hal tersebut dikarenakan kota ini merupakan ibukota ISIS di Iraq dan tempat pendeklarasian berdirinya ISIS oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Setelah banyak wilayah Iraq yang berhasil direbut kembali

oleh pemerintah, maka Mosul merupakan benteng terkuat ISIS yang terakhir.

Selain itu, Mosul adalah kota industri di Iraq utara yang menjadi kunci utama dalam aktivitas perdagangan dengan Turki dan Syria. Mosul merupakan kota pengekspor minyak, agrikultur, mineral dan produk-produk industri. Minyak merupakan kontributor utama dalam perekonomian Mosul sejak 1920an. Sektor industri seperti industri semen, tekstil, pakaian, gula, dan makanan mengalami perkembangan sejak 1970an dan 1980an. Mosul juga dikenal sebagai penghasil wol, kulit, industri farmasi dan tambang sulfur. Mosul memiliki lima industri semen yang semuanya dimiliki oleh *Northern Cement Company*. Menteri Perindustrian Iraq menyatakan bahwa industri semen di Mosul menghasilkan lebih dari satu juta ton semen per tahun dengan kualitas terbaik dan harga termurah dibandingkan tempat-tempat lain di Iraq. Akan tetapi, setelah Mosul dikuasai oleh ISIS, kelompok ini melakukan eksploitasi terhadap banyak perusahaan dan mengumpulkan uang dari para pemilik bisnis untuk mendanai organisasi. Banyak perusahaan yang kemudian tutup karena kondisi keamanan, kekurangan bahan mentah atau tidak adanya aliran listrik untuk operasional. ISIS juga menguasai ladang-ladang minyak, kilang minyak, perusahaan gas dan tempat pengisian bahan bakar yang ada di Mosul. Kelompok ini kemudian melakukan monopoli penjualan minyak dan mendapatkan banyak keuntungan dengan menjual minyak melalui pasar gelap. Keberadaan ISIS di Mosul pun menyebabkan terhentinya banyak program pemerintah dan perekonomian Mosul menjadi kolaps. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah Iraq merebut kembali Mosul dari penguasaan ISIS. (United Nations Human Settlements Programme in Iraq, 2016)

Berikut ini merupakan peta industri yang ada di Mosul, diambil dari laporan *United Nations Human Settlements Programme in Iraq* :

Gambar III.4. Peta Industri di Mosul



Source : UN Human Settlements Programme in Iraq

Pemerintah Iraq menyiapkan kekuatan militer dan aliansi yang cukup kuat untuk membebaskan Mosul. Kelompok ISIS sendiri diperkirakan memiliki 5000 pejuang untuk mempertahankan Mosul. Berikut ini merupakan data kekuatan militer dan aliansi yang dihimpun oleh pemerintah Iraq untuk Operasi Pembebasan Mosul :

- *ISF (Iraqi Security Forces)* : Lebih dari 50,000 militer Iraq diterjunkan dalam operasi ini. (Hum, 2016)
- *Popular Mobilization Forces* : sekitar 14,000 personel. (Hum, 2016) Berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Iraq, PMF ini termasuk ke dalam institusi militer dan keamanan Iraq. PMF adalah kelompok paramiliter Iraq yang didominasi oleh milis Syiah, meskipun juga terdapat milisi Sunni, Kristen dan Yazidi di dalamnya. Ada beberapa kelompok Syiah yang berpartisipasi dalam PMF seperti Saraya

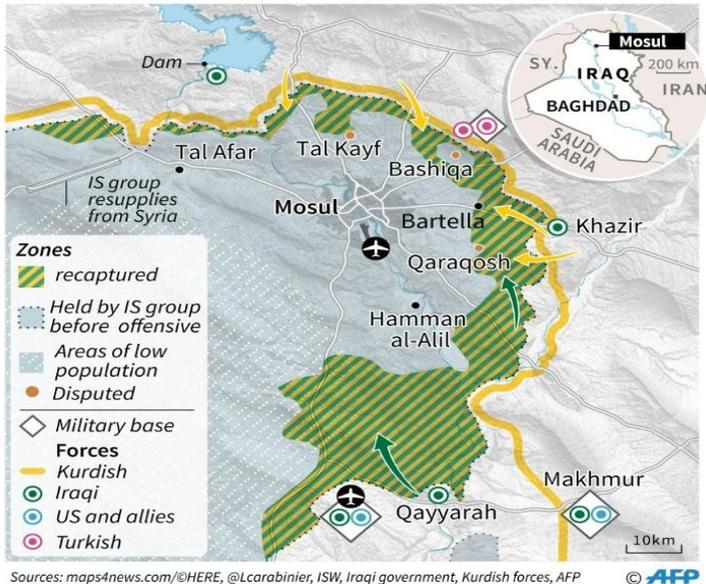
al-Islam, Badr Organization, Hezbollah Al-Noujabaa Movement, Asaeb Ahel Al-Haq, dsb. (Assi, 2016)

- Peshmerga *Forces* (Militer KRG) : 40,000 personil termasuk tentara perempuan. (Hum, 2016)
- Koalisi Internasional : Koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat akan terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul dengan memberikan pelatihan militer, konsultasi militer, intelijen, dan artileri. Setidaknya ada 500 tentara Amerika Serikat yang diterjunkan dalam operasi. (Assi, 2016) Pemerintah Inggris juga memberikan bantuan berupa pesawat tempur, drone dan 500 tentara untuk memberikan pelatihan militer kepada tentara Iraq dan Peshmerga. (The Telegraph, 2016)
- Iran : Berdasarkan pernyataan resmi dari penasehat tinggi Korps Pengawal Revolusi Islam milik pemerintah Iraq, negara ini akan terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul dengan menyediakan penasehat serta ahli militer kepada pemerintah Iraq dan PMF sebagai bentuk dukungan. (Assi, 2016)

Berikut ini merupakan peta kekuatan yang terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul :

Gambar III.5. Peta Kekuatan Dalam Operasi Pembebasan Mosul

The battle for Mosul



Source : maps4news.com

Operasi ini dimulai dengan serangan artileri dari militer Iraq, Peshmerga dan polisi federal. Artileri yang digunakan untuk menyerang ISIS ada yang merupakan artileri milik Prancis dan Amerika Serikat. Upaya pertama untuk membebaskan Mosul difokuskan di wilayah Nineveh Plain, Talkef dan Ba'asheqa. Operasi militer merebut kembali Mosul terbagi menjadi tiga fase, yaitu : (Assi, 2016)

1. Mengisolasi kota. Fase ini dimulai dengan mengontrol pangkalan udara Qayyara yang terletak 60 km di sebelah selatan Mosul dan menjadikan

pangkalan udara tersebut sebagai tempat mendarat pesawat kargo yang membawa amunisi dan bahan bakar. Sistem artileri yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Prancis juga sudah dilengkapi dengan alat tembak yang dapat menjangkau Mosul kurang dari 20 detik.

2. Menekan dari daerah gurun. Fase ini merupakan termasuk upaya koalisi militer untuk masuk ke Kota Mosul. Pada fase ini dibagi menjadi beberapa poros, yaitu : poros utara dan timur yang dipegang oleh Peshmerga dan Atheel al-Nujaifi; poros barat yang dipegang oleh Peshmerga, *Sinjar Protecting Forces* yang memobilisasi 500 paramiliter Sunni dan Turkmen; poros selatan yang dipegang oleh militer Iraq, 6000 polisi Nineveh, *Sunni Tribal Mobilization* yang mencakup suku Al-Laheeb, Al-Jobour, dan Al-Saba'awyeen. Paramiliter Syiah yang tergabung dalam PMF (Popular Mobilization Forces) memiliki dua tugas dalam operasi tersebut, yaitu mengamankan rute logistik dari utara Provinsi Salah al-Din sampai pangkalan militer Qayyarah serta mengisolasi area al-Shoura dan Hamam-Al-Alil bersama dengan polisi federal.
3. Menghancurkan daerah pertahanan ISIS. Fase ini bertujuan untuk mengikuti jejak kelompok ISIS di dalam kota. Koalisi meyakini bahwa pejuang-pejuang ISIS telah meninggalkan area kota dan membangun pertahanan di kota-kota sekitar Mosul.

Operasi militer ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan penduduk kota Mosul. Sebanyak 1,3 juta penduduk keluar dari kota dan mengungsi di wilayah lain yang masih termasuk ke dalam Provinsi Nineveh, bahkan hingga ke wilayah Dohuk dan Erbil. Namun pasca Mosul berhasil dibebaskan dari kelompok militan ISIS, sebanyak 20.000 penduduk telah kembali ke kota. Para penduduk saat ini masih membutuhkan bantuan kemanusiaan karena selama dikuasai

oleh ISIS perekonomian Mosul menjadi terpuruk dan banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. (Culbertson, 2017)

Lebih lanjut, Amnesty Internasional menyatakan bahwa taktik yang digunakan oleh pemerintah Iraq beserta koalisi internasional telah melanggar hukum humaniter dan dapat disebut sebagai penjahat perang. Sejak Januari, militer Iraq dan koalisi internasional telah melakukan serangkaian serangan di Mosul barat dengan menggunakan *Improvised Rocket Assisted Munitions* (IRAMs) yang menyebabkan kerusakan di wilayah padat penduduk. Amnesty Internasional menyebutkan jumlah korban serangan koalisi pemerintah Iraq di Mosul barat mencapai 3.706 jiwa. *United Nations High Commissioner for Human Rights*, Zeid Ra'ad Al Hussein, memerintahkan pemerintah Iraq untuk melakukan investigasi terkait pernyataan dari Amnesty Internasional. (Kalin, 2017)

C. Bentuk Keterlibatan Turki Dalam Operasi Pembebasan Mosul

Pemerintah Turki memutuskan untuk terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Kebijakan tersebut diungkapkan oleh Presiden Erdogan melalui pernyataannya, *"We will be in the operation and we will be at the table. Our brothers are there and our relatives are there. It is out of the question that we are not involved."* (McKernan, 2016) Pernyataan Presiden Erdogan tersebut didukung oleh Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim yang mengatakan bahwa militer Turki sudah berada di wilayah Bashiqa, sebuah kota di sebelah timur Mosul dan masih termasuk Provinsi Nineveh. (Aljazeera, 2016)

Meskipun Operasi Pembebasan Mosul baru dimulai pada Oktober 2016, namun pemerintah Turki sudah mengirimkan militernya ke wilayah Bashiqa sejak tahun 2015. Pemerintah Turki beralasan bahwa pengiriman militer ke wilayah Iraq tersebut adalah untuk memberikan bantuan militer kepada Peshmerga dalam memerangi kelompok ISIS. Kerjasama militer Turki-Peshmerga tersebut disetujui pada 4 November 2015 dan mulai awal Desember 2015 pemerintah

Turki mengirimkan setidaknya 150 tentara beserta 20 hingga 25 tank ke Bashiqa. (Hurriyet Daily News, 2015)

Pengiriman sejumlah tentara dan alutsista tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Iraq. Bahkan Menteri Luar Negeri Iraq menyebut penempatan pasukan oleh Turki sebagai sebuah “serangan”. Perdana Menteri Iraq, Haider al-Abadi menyatakan bahwa tidak ada izin dari pemerintah Iraq bagi penempatan setidaknya satu batalion tentara Turki di area dekat Mosul, Provinsi Nineveh. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes pemerintah Iraq memutuskan memanggil duta besar Turki untuk Iraq dan meminta Turki segera menarik kembali pasukannya. (Aljazeera, 2015)

Meskipun mendapat penolakan dari pemerintah Iraq, akan tetapi Turki tetap belum menarik militernya. Presiden Erdogan memberikan sebuah pernyataan yang dikutip oleh New York Times, “*We have a historical responsibility in the region. If we want to be both at the table and in the field, there is a reason*”. Turki mengklaim bahwa penempatan pasukannya di wilayah Iraq adalah berdasarkan permintaan dari KRG dan mantan Gubernur Mosul, Atheel al-Nujaifi agar Turki memberikan bantuan serta pelatihan militer kepada Peshmerga dan *Nineveh Guard*. *Nineveh Guard* merupakan kelompok paramiliter Sunni yang dipimpin oleh Atheel al-Nujaifi. Sebelum Operasi Pembebasan Mosul dimulai setidaknya sudah ada 500 militer Turki yang ditempatkan di wilayah Bashiqa dan menjelang dimulainya operasi, parlemen Turki justru memutuskan untuk memperpanjang penempatan sebanyak 2000 pasukannya di seluruh wilayah Iraq utara dengan alasan untuk memerangi organisasi teroris. Deputy Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmuş mengatakan bahwa setidaknya ada 3000 pasukan yang sudah dilatih oleh militer Turki akan bergabung dalam Operasi Pembebasan Mosul. Pemerintah Iraq sangat mengutuk kebijakan pemerintah Turki dan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan perang regional. Bahkan pemerintah Iraq juga meminta kepada UNSC (*United Nations Security Council*)

agar mengadakan pertemuan darurat untuk membahas isu tersebut. (Bora, 2016)